BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi Ramah Lingkungan merupakan salah satu jenis transportasi ramah lingkungan yang “berorientasi pada masyarakat”. dan transportasi sepeda merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan pengembangan transportasi ramah lingkungan (Jiali and Shutao 2021). Pada saat ini pemerintah sudah sering melakukan pemecahan masalah untuk kondisi meningkatnya volume kendaraan yang terjadi antara lain dengan melakukan perbaikan di sistem transportasi umum, selain transportasi umum salah satu alternatifnya adalah dengan menyarankan penggunaan sepeda.

Sepeda merupakan kendaraan yang umum dimiliki oleh masyarakat Indonesia, biasanya setiap rumah pasti memiliki satu unit sepeda dirumahnya. Sepeda adalah kendaraan roda dua yang tidak memiliki mesin, yang bergerak menggunakan tenaga manusia dengan cara dikayuh. Sepeda merupakan alat transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas buang yang mencemari udara (Sidjabat 2016). Kemampuan bersepeda biasanya dihitung dari kombinasi faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan jalan dan jalur sepeda (fasilitas sepeda): luasnya, cakupannya dan kenyamanannya, keselamatan, potensi konflik dengan pengguna jalan lain apakah fasilitas bersepeda dapat dinavigasi dan terhubung dengan tempat-tempat yang ingin dikunjungi oleh pengendara sepeda (Beecham. 2023)

Peningkatan penggunaan transportasi pribadi yang tidak ramah lingkungan memiliki pengaruh tinggi terhadap emisi gas karbon untuk mengatasi hal itu diperlukan suatu perubahan salah satunya yaitu penerapan konsep green transportation. Kabupaten Bangka Barat masih

belum memiliki jalur khusus sepeda. Adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk membuat zona hijau yang ada pada kawasan pemerintahan. Pengguna sepeda yang masih harus berbagi ruas jalan dengan pengendara kendaraan bermotor lainnya tentunya menjadi resiko bagi pengguna sepeda karena kurangnya keamanan bagi pengguna sepeda.

Jalur Khusus Sepeda merupakan jalur yang dibuat khusus untuk pengguna sepeda, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna sepeda. Pengguna sepeda memang perlu diberi fasilitas lebih untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna sepeda, jalur khusus ini juga bisa meningkatkan kecepatan berlalu lintas bagi para pengguna sepeda. Selain itu pengguna sepeda perlu di tingkatkan dikarenakan kendaraan ini tidak menyebabkan polusi udara dan hemat energi (Asasi and Dra. Puji Astuti 2019). Kabupaten Bangka Barat sendiri belum memiliki jalur khusus untuk kendaraan sepeda.

Dengan beberapa alasan di atas maka diperlukan adanya perencanaan terkait jalur khusus sepeda di Kabupaten Bangka Barat. Adanya perencanaan jalur khusus pesepeda merupakan tugas dari pemerintah sesuai dengan UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 62 ayat 1 yaitu "Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda". Aturan undang-undang tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang fasilitas sepeda. Maka dengan latar belakang yang ada penulis mengajukan judul penelitian yaitu **"Perencanaan Jalur Khusus Sepeda Di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat"**.

Dengan adanya perencanaan pembuatan jalur khusus pesepeda ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan bagi pengguna sepeda dan bertambahnya minat masyarakat untuk lebih lagi dalam menggunakan sepeda serta meningkatkan kegiatan transportasi yang ramah lingkungan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi latar belakang penelitian, maka di dapatkan permasalahan yang terjadi di kawasan studi, berikut merupakan identifikasi masalah yang terdapat di kawasan studi:

1. Belum adanya jalur khusus sepeda di Kabupaten Bangka Barat.
2. Adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk membuat zona hijau yang ada pada Kawasan Pemerintahan.
3. Belum adanya rencana tata ruang Kawasan yang terkait dengan jalur khusus untuk pesepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
4. Tercampurnya arus lalu lintas antara pengguna sepeda dan pengguna kendaraan bermotor yang dapat membahayakan keselamatan pesepeda.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usulan pemilihan rute untuk jalur khusus sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ?
2. Bagaimana perbandingan kinerja ruas jalan sebelum dan sesudah usulan pemilihan rute dan desain jalur khusus sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ?
3. Bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana untuk jalur khusus sepeda yang akan di buat di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk merencanakan rute khusus pesepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Merencanakan usulan pemilihan rute jalur khusus sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
2. Menganalisa perbandingan kinerja ruas jalan sebelum dan sesudah usulan pemilihan rute dan desain jalur khusus sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
3. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk jalur khusus sepeda yang akan ada di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

1.5 Ruang Lingkup

Di dalam penelitian ini, agar peneliti dapat fokus pada ruang lingkungannya maka dibatasi dimana lokasi penelitiannya terbatas pada ruas jalan yang dimana akan direkomendasikan untuk jalur khusus sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Adapun batasan masalah pembahasan dari penelitian ini yang difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah penelitian yang dikaji adalah Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat
2. Usulan Pemilihan Rute untuk jalur khusus sepeda yang akan diterapkan di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
3. Perbandingan Kinerja Ruas Jalan sebelum dan sesudah dilakukan usulan rute khusus jalur sepeda di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
4. Sarana dan Prasarana yang akan digunakan di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.